



# RANCANGAN AKHIR - PERUBAHAN KE-2 RENSTRA BAKORWIL I MADIUN TAHUN 2019-2024



**BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN  
PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR DI MADIUN  
(BAKORWIL I MADIUN)**

Jl. Pahlawan No. 31 Madiun Telp. 0351-464151 Fax. 0351-457580  
[www.bakorwilmadiun.jatimprov.go.id](http://www.bakorwilmadiun.jatimprov.go.id)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga pada saatnya Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun (Bakorwil I Madiun) dapat menyusun dokumen Renstra Perubahan Tahun 2019-2024.

Dokumen Renstra ini disusun berdasarkan kerangka acuan berupa Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, yang memuat 7 (tujuh) misi utama serta arah kebijakan umum yang hendak dicapai dalam tahun 2019-2024.

Keberhasilan penyusunan dokumen Perubahan ke-2 Renstra ini semata-mata hanya karena terwujudnya rasa kebersamaan tanggung jawab dan peran serta aktif semua unsur yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan Ekonomi, Bidang Kemasyarakatan dan Bidang Sarana dan Prasarana serta didukung unsur staf yang ada di Bakorwil I Madiun.

Dengan disusunnya dokumen Perubahan ke-2 Renstra ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja Bakorwil Madiun secara berkelanjutan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>TABEL GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyesuaian.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAKORWIL I MADIUN.....</b>	<b>7</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bakorwil I Madiun.....	7
2.2 Sumber Daya Bakorwil I Madiun.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Bakorwil I Madiun.....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bakorwil I Madiun.....	25
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....</b>	<b>29</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	29
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Terpilih.	29
3.3 Telaahan Renstra K/L.....	30
3.4 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	30
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	33
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>35</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bakorwil I Madiun.....	35
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>37</b>
<b>5.1 Strategi dan Kebijakan.....</b>	<b>37</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>38</b>
<b>6.1 Rencana Program.....</b>	<b>38</b>
<b>6.2 Kegiatan.....</b>	<b>39</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>53</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>54</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024.....	21
Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2020.....	22
Tabel 3. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	29
Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bakorwil I Madiun.....	36
Tabel 5. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	37
Tabel 6. Program dan Kegiatan Tahun 2019.....	41
Tabel 7. Program dan Kegiatan Tahun 2020.....	43
Tabel 8. Program dan Kegiatan Tahun 2021-2024.....	46
Tabel 9. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	53
Tabel 10. Nawa Bhakti Satya – Bakorwil I Madiun.....	53

## **TABEL GAMBAR**

Gambar 1. Susunan Organisasi Bakorwil I Madiun

17

### **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Untuk memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024. Penyusunan Renstra Bakorwil I Madiun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Renstra sebagaimana dimaksud merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan dokumen Renstra Bakorwil I Madiun berpedoman pada Prioritas Pembangunan, Sasaran dan arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta pendanaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif. Dengan dokumen rencana strategis tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam setiap penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan.

Bakorwil I Madiun dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Koordinasi

Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Latar belakang dilaksanakannya Renstra Perubahan meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan nasional terkait Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

## **1.2 Dasar Hukum Penyesuaian**

Dasar hukum penyesuaian penyusunan Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- r. Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
- t. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- w. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031;
- x. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
- y. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
- z. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
- aa. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);

bb. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor \_\_\_\_ Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor \_\_\_\_ Seri \_\_\_\_, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor \_\_\_\_);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renstra Perubahan Bakorwil I Madiun adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Perubahan RPJMD) Provinsi Jawa Timur ke dalam perencanaan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan Renstra ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jawa Timur yang bersifat indikatif.

Renstra juga merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan dan kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra ini maka akan lebih jelas bagi organisasi terhadap arah yang akan dituju. Dengan demikian diharapkan penyusunan Renstra ini dijadikan sebagai dokumen dasar atau acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Bakorwil I Madiun untuk mengakomodir visi, misi, program dan sasaran Gubernur Jawa Timur yang telah ditetapkan sebagai pedoman dan kendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019-2024.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Perubahan Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024 disusun dengan tata urutan penulisan sebagaimana diatur oleh Permendagri No. 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

berisi tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra. Dalam bab ini juga disajikan tata urutan penulisan yang merupakan alur berfikir dari dokumen rencana strategis.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN**

Berisi uraian tentang struktur organisasi Bakorwil I Madiun, tugas pokok dan fungsinya, serta wilayah kerjanya. Bab ini juga dilengkapi dengan data- data tentang sumber daya organisasi, kinerja yang telah diraih oleh Bakorwil I Madiun pada era sebelumnya serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

yang berisi gambaran tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi, dan program Gubernur Jawa Timur, serta penentuan isu-isu strategis yang ada di wilayah kerja Bakorwil I Madiun.

## **BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN,**

berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Bakorwil I Madiun.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

berisi rumusan pernyataan tentang strategi dan arah kebijakan Bakorwil I Madiun dalam 5 (lima) tahun mendatang.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

berisi rumusan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

berisi tentang indikator kinerja Bakorwil I Madiun yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bakorwil I Madiun dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP,**

berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Bakorwil I Madiun.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BAKORWIL I MADIUN**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bakorwil I Madiun**

Bakorwil I Madiun adalah salah satu di antara 5 (lima) Bakorwil yang ada di Provinsi Jawa Timur, dan keberadaannya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan mempunyai **tugas pokok** *membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.*

Ditinjau dari segi kewilayahan maka keberadaan dan peran Bakorwil cukup strategis dalam membantu Gubernur Jawa Timur melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan melaksanakan program-program di wilayah Jawa Timur.

Wilayah kerja Bakorwil I Madiun meliputi 10 (sepuluh) kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur bagian barat yaitu "**Pawitan Dirogo Tunggal Diri**": 1. Kab. Pacitan, 2. Kab. Ngawi, 3. Kab. Magetan, 4. Kab. Madiun, 5. Kota Madiun, 6. Kab. Ponorogo, 7. Kabupaten Tulungagung, 8. Kabupaten Trenggalek, 9. Kab. Kediri dan 10. Kota Kediri. Luas kabupaten/kota di wilayah kerja Bakorwil I Madiun adalah 9.776 km<sup>2</sup> (20.5% dari luas wilayah Jawa Timur) dengan penduduk kurang lebih 7.850.000 jiwa (19.9% dari jumlah penduduk Jawa Timur).

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Bakorwil I Madiun memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;

4. Pemberdayaan dan memfasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
5. Pemberian masukan/saran pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian penghargaan atau sanksi kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
6. Pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
7. Penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antar pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
8. Pemberian rekomendasi kepada Gubernur atas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
10. Pelaksanaan optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
11. Pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Susunan organisasi Bakorwil I Madiun terdiri dari seorang Kepala Bakorwil yang dibantu oleh Sekretaris dan 4 (empat) bidang yang mempunyai fungsi yaitu:

- (1) **Sekretariat** mempunyai fungsi:
  - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
  - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
  - e. Pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
  - f. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
  - g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

- h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- j. Pengelolaan kearsipan;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakorwil.

Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang terdiri dari:

- 1. Sub Bagian Tata Usaha;
- 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- 3. Sub Bagian Keuangan.

(2) **Bidang Pemerintahan** mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi dan pemerintahan antar pemerintah bidang ketentraman, ketertiban umum dan

- perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas dekonsentrasi;
  - f. Pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
  - g. Penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
  - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
  - i. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait;
  - j. Pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tidak dilaksanakan

- Perangkat Daerah terkait; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakorwil.

Kepala Bidang Pemerintahan dibantu Sub Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan yang terdiri dari: Sub Bidang Pemerintahan I; Sub Bidang Pemerintahan II.

(3) **Bidang Pembangunan Ekonomi** mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi dan pemerintahan antar pemerintah bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas dekonsentrasi;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan,

perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

- g. Penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- i. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait;
- j. Pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakorwil.

Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dibantu Sub Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi yang terdiri dari:

1. Sub Bidang Pembangunan Ekonomi I;
2. Sub Bidang Pembangunan Ekonomi II.

(4) **Bidang Kemasyarakatan** mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan,

sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi dan pemerintahan antar pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas dekonsentrasi;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga,

pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

- g. Penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- i. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan
- j. perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait;
- k. Pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakorwil.

Kepala Bidang Kemasyarakatan dibantu Sub Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kemasyarakatan yang terdiri dari :

1. Sub Bidang Kemasyarakatan I;
2. Sub Bidang Kemasyarakatan II.

(5) **Bidang Sarana dan Prasarana** mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi dan pemerintahan antar pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi

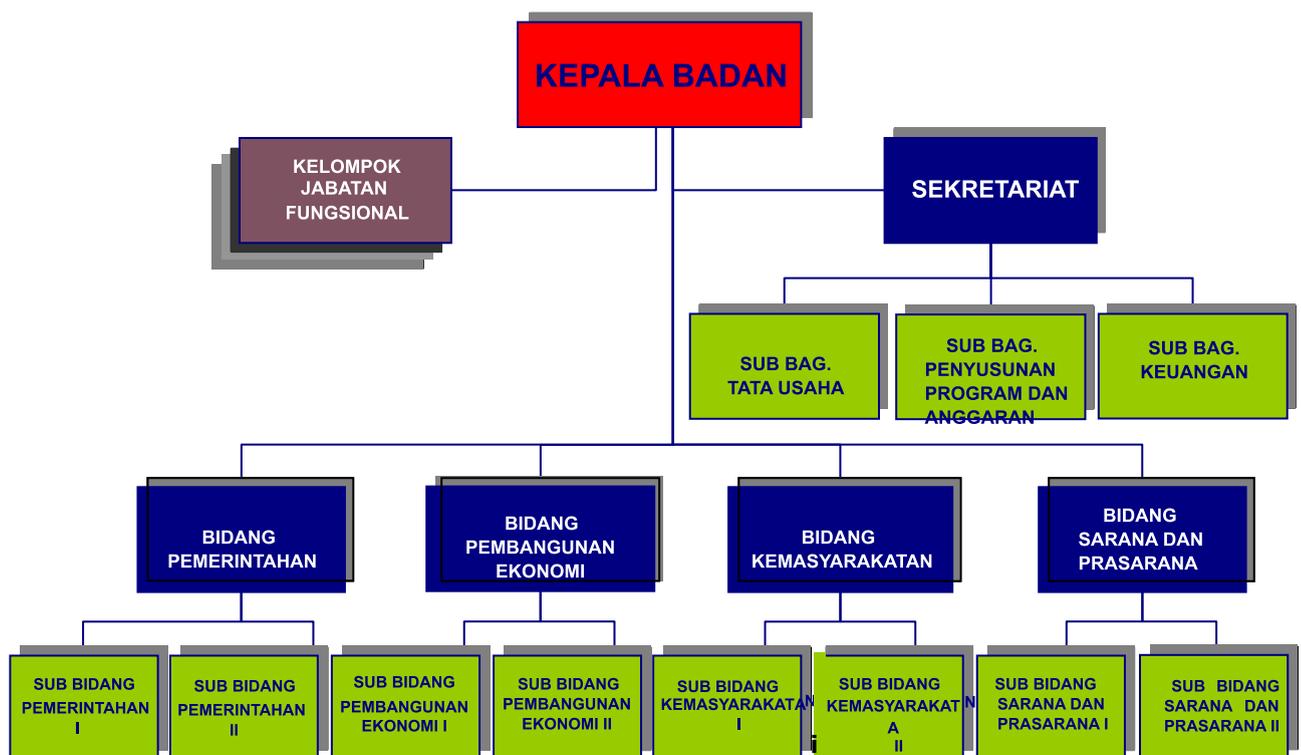
terhadap tugas-tugas dekonsentrasi;

- f. Pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- g. Penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- i. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait;
- j. Pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakorwil.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dibantu Sub Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana yang terdiri dari :

1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana I;
2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana II;

Untuk lebih jelasnya, berikut susunan organisasi Bakorwil I Madiun:



Gambar 1. Susunan Organisasi Bakorwil I Madiun

## 2.2 Sumber Daya Bakorwil I Madiun

Keadaan pegawai, sarana dan prasarana di Bakorwil I Madiun sampai pada akhir bulan Februari 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

### A. Keadaan Pegawai

1) Jumlah pejabat struktural dan staf Bakorwil I Madiun

adalah 59 orang, yang terdiri dari

- Pejabat Struktural Eselon II : 1 orang
- Pejabat Struktural Eselon III : 4 orang
- Pejabat Struktural Eselon IV : 10 orang
- Staf : 44 orang

- Pegawai Tidak Tetap (PTT)	:	<u>2 orang +</u>
Jumlah	:	61 orang

2) Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

- Golongan I	:	1 orang
- Golongan II	:	22 orang
- Golongan III	:	32 orang
- Golongan IV	:	5 orang
- Pegawai Tidak Tetap (PTT)	:	<u>2 orang +</u>
Jumlah	:	61 orang

3) Jumlah pegawai berdasarkan Jenis kelamin

Laki-laki	:	48 orang
Perempuan	:	<u>13 orang +</u>
Jumlah	:	61 orang

4) Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan :

a. Pascasarjana	:	5 orang
b. Sarjana	:	23 orang
c. Diploma	:	3 orang
d. SLTA	:	29 orang
e. SLTP	:	1 orang
f. SD	:	<u>- orang</u>
Jumlah	:	61 orang

Berdasarkan hasil analisis beban kerja dan analisis jabatan, maka jumlah kebutuhan Pegawai Bakorwil I Madiun sebanyak 79 pegawai, sehingga keadaan pegawai masih kurang sebanyak 20 pegawai.

## B. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Bakorwil I Madiun adalah sebagai berikut :

1) Bangunan dan tanah:

a. Tanah	:	19.289 m2
b. Bangunan gedung kantor	:	1.930 m2
c. Bangunan gedung Dipenda	:	455 m2
d. Bangunan pendopo rumah dinas jabatan	:	1.344 m2
e. Bangunan masjid kantor	:	64 m2



- h. Bangunan pos jaga dan paseban : 37 m<sup>2</sup>
  - i. Bangunan garasi : 190 m<sup>2</sup>
  - j. Bangunan rumah dinas : 606 m<sup>2</sup>
- 2) Kendaraan kantor:
- a. Kendaraan bermotor
    - roda empat atau lebih : 14 buah
  - b. Kendaraan bermotor
    - roda dua : 17 buah
- 3) Mesin/peralatan perkantoran:
- a. Mesin ketik manual : 6 buah
  - b. Mesin ketik elektronik : 1 buah
  - c. Mesin komputer : 30 buah
  - d. Notebook : 10 buah
- 4) Meubelair dan peralatan kantor lainnya :
- a. Lemari besi / kayu : 28 buah
  - b. Meja tulis / rapat : 130 buah
  - c. Meja kursi tamu : 15 buah
  - d. Kursi kerja / rapat : 260 buah
  - e. Brankas : 1 buah
  - f. Overhead projector/infra : 3 buah
  - g. Mesin hitung manual : 5 buah
  - h. Faximile : 2 buah
  - i. Telepon : 12 buah
- 5) Sarana lain - lain :
- a. AC : 34 buah
  - b. Lemari es : 7 buah
  - c. Video kamera : 4 buah
  - d. TV : 14 buah
  - e. Sound sistem : 3 buah
  - f. Kamera Photo : 6 buah
  - g. Tandon air : 3 buah
  - h. Mesin pompa air : 5 buah



### **2.3 Kinerja Pelayanan Bakorwil I Madiun**

Pencapaian kinerja pelayanan Bakorwil I Madiun tahun 2019-2024, dapat dijelaskan dalam tabel evaluasi yang disajikan berikut ini:

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun -						Realisasi Capaian Tahun -						Rasio Capaian pada Tahun -					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.	Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun	-	-	√	80.09	80.10	80.15	80.20	80.25	80.30	80.09	80.03	80.05	-	-	-	100%	99.9%	99.9%	-	-	-
2.	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	-	-	√	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	105.26%	100%	100%	100%	-	-

Pencapaian kinerja pelayanan Bakorwil Madiun tahun 2019 telah terlaksana dengan baik dan lancar melalui kegiatan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya. Namun di tahun 2020 terdapat sedikit hambatan karena adanya pandemic Covid-19 dimana terjadi *refocusing* anggaran yang menyebabkan beberapa program kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2020

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN						REALISASI ANGGARAN						RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN						Rata-rata Pertumbuhan		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
1	2	3						4												(17)	(18)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	574,707,300.00	-	-	-	-	-	508,406,552.00	-	-	-	-	-	-	88.46	-	-	-	-	-		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,691,908,300.00	-	-	-	-	-	4,195,435,967.00	-	-	-	-	-	-	89.42	-	-	-	-	-		
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	1,636,370,500.00	-	-	-	-	-	1,507,916,412.00	-	-	-	-	-	-	92.15	-	-	-	-	-		
4	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	173,515,500.00	-	-	-	-	-	151,838,398.00	-	-	-	-	-	-	87.51	-	-	-	-	-		
5	Program Pelayanan Kesekretariatan	-	2,520,619,842	-	-	-	-	-	2,481,804,834	-	-	-	-	-	98.46	-	-	-	-	-		
6	Program Koordinasi, Fasilitasi, dan Monev Penyelenggaraan EJSC	-	27,075,000.00	-	-	-	-	-	26,473,250.00	-	-	-	-	-	97.78	-	-	-	-	-		
7	Program Koordinasi, Fasilitasi, dan Monev Penyelenggaraan	610,000,000.00	263,750,000.	-	-	-	-	599,705,737.00	260,659,557	-	-	-	-	-	98.31	98.83	-	-	-	-		

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN						REALISASI ANGGARAN						RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN						Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3						4												(17)	(18)
	Pemerintahan dan Pembangunan - <b>Bidang Pemerintahan</b>																				
8	Program Koordinasi, Fasilitasi, dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - <b>Bidang Pembangunan Ekonomi</b>	660,000,000.00	269,412,866	-	-	-	-	629,443,449.00	263,323,720	-	-	-	-	95.37	97.74	-	-	-	-		
9	Program Koordinasi, Fasilitasi, dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - <b>Bidang Kemasyarakatan</b>	660,000,000.00	159,148,031	-	-	-	-	629,416,090.00	158,971,718	-	-	-	-	95.37	99.89	-	-	-	-		
10	Program Koordinasi, Fasilitasi, dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - <b>Bidang Sarana dan Prasarana</b>	610,000,000.00	187,455,878	-	-	-	-	595,792,363.00	187,018,878	-	-	-	-	97.67	99.66	-	-	-	-		
11	Program Pengembangan Data Informasi	327,922,400.00	21,233,500	-	-	-	-	255,785,233.00	21,077,350	-	-	-	-	78	99.26	-	-	-	-		

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN						REALISASI ANGGARAN						RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN						Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3						4												(17)	(18)
12	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kewilayahan	-	-	1.261.769.500	-	-	-	-	-	1.241.526.457	-	-	-	-	-	98.4	-	-	-		
13	Program Pelayanan Kesekretaria tan	-	-	13.490.251.500	15.432.595.000	15.816.476.000	16.945260.000	-	-	12.966.422.427	14.851.082.036	-	-	-	-	96,12%	96.32%	-	-		
14	Program Pelayanan Penghubung	-	-	-	561.920.000	1.500.000.000	2.000.000.000	-	-	-	557.498.025	-	-	-	-	-	99.21%	-	-		

Tidak ada kenaikan realisasi dari tahun anggaran 2019 dan 2020. Hal ini karena program dan kegiatan yang dilaksanakan Bakorwil I Madiun berjalan sesuai dengan perencanaan. Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan menimbulkan kebijakan *refocusing* anggaran program dan kegiatan di Bakorwil I Madiun. Hal tersebut berpengaruh juga terhadap jumlah target yang telah ditetapkan di awal tahun perencanaan.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bakorwil I Madiun**

### **A. Tantangan**

Wilayah kerja Bakorwil I Madiun yang berada di bagian barat Provinsi Jawa Timur memiliki sifat dan karakteristik tersendiri yang kental dengan budaya Mataraman. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bakorwil I Madiun.

Pandemi Covid-19 yang bermula pada awal tahun 2020 dan melanda hampir di seluruh dunia telah banyak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dilakukan dengan monitoring dan evaluasi maupun koordinasi secara bertahap diubah menjadi pertemuan yang bersifat daring (dalam jaringan) yang dimaksudkan untuk mengurangi interaksi antar manusia yang bisa menjadi menularnya virus dari Covid-19.

Sebagai wilayah otonomi daerah, kabupaten/kota di wilayah kerja Bakorwil I Madiun pernah mengalami konflik wilayah perbatasan. Konflik-konflik tersebut dapat menimbulkan friksi-friksi yang tidak baik antar pemerintah kabupaten/kota yang terlibat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Bakorwil mengupayakan mediasi dan fasilitasi untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan sama sekali potensi konflik tersebut. Pada tataran ini peran Bakorwil yang menjadi kepanjangan tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi lebih signifikan.

Hubungan hirarki antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang tidak top-down atau sistem komando menjadikan tantangan tersendiri bagi Bakorwil. Dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Timur dibutuhkan dukungan pemerintah kabupaten/kota. Untuk itu peran Bakorwil dalam menyelaraskan dengan dengan kabupaten/kota tersebut dengan upaya koordinasi, fasilitasi, dorongan serta kerjasama dengan kabupaten/kota.

Persaingan antar kabupaten/kota merupakan hal yang dapat terjadi dalam sebuah pemerintahan otonomi. Persaingan-persaingan tersebut dapat menimbulkan pula dampak pada disparitas wilayah. Hal ini bisa

berdampak dan menimbulkan kerawanan-kerawanan termasuk kerawanan sosial. Kondisi ini dapat dieliminasi antara lain dengan jalan melalui kerjasama kewilayahan yang bersinergi dan saling menguntungkan. Kerjasama kewilayahan yang telah dirintis perlu dioptimalkan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten/Kota terkait. Kerjasama kewilayahan yang perlu untuk dibentuk di sektor-sektor antara lain: pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, industri, perikanan, agroindustri, kehutanan, peternakan dan perdagangan.

Sejalan dengan isu strategis pertama sebagaimana tersebut di atas, maka untuk mengoptimalkan dukungan Kabupaten/Kota terhadap program Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu dioptimalkan upaya koordinasi dan fasilitasi, dorongan serta kerjasama dengan Kabupaten/Kota oleh Bakorwil di wilayah kerja masing- masing.

Kondisi pembangunan Kabupaten/Kota saat ini masih dihadapkan permasalahan pembangunan antara lain: (1) pemerataan pembangunan ekonomi yang belum merata yang diindikasikan dengan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi serta tingkat kemiskinan antar wilayah; dan (2) belum mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah.

Dalam kaitan ini, sinergi pembangunan daerah secara regional khususnya di wilayah Bakorwil I Madiun perlu optimalisasi dalam implementasi kegiatan fasilitasi, mediasi dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya peningkatan keterpaduan program pembangunan antar- wilayah yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, mewujudkan kelestarian lingkungan, pengembangan kawasan Agropolitan Wilis, Kawasan Agropolitan Kelud, dan Jalan Lintas Selatan (JLS).

Untuk mewujudkan tercapainya visi Jawa Timur yaitu ***Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul, dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong*** maka dibutuhkan adanya perencanaan yang mantap

terutama sinergisme perencanaan antar Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten/Kota sehingga tercipta perencanaan yang sinergi yang didukung oleh data-data yang akurat dan merupakan kebutuhan riil daerah. Oleh karena itu sistem perencanaan, seperti pelaksanaan Musrenbang yang melibatkan kabupaten/kota dan Perangkat Daerah Provinsi, perlu ditingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, antara lain melalui pelibatan seluruh *stakeholder* Kabupaten/Kota terkait.

## **B. Peluang**

Bakorwil memiliki kedekatan dengan kabupaten/kota dilihat dari sisi lokasi maupun hubungan emosional. Kedekatan ini akan memberi peluang lebih awal kepada Bakorwil untuk dapat memperoleh dan mengelola data yang akurat dari masing-masing Kabupaten/Kota, baik yang diperoleh pada saat koordinasi, monitoring termasuk peninjauan lapangan dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh Bakorwil dengan Kabupaten/Kota. Selanjutnya akan memperkuat program Satu Data Indonesia atau Big Data yang menjadi pusat sumber data yang lebih akurat. Pada saat ini Bakorwil belum secara optimal dapat menyediakan data-data dalam konteks kewilayahan yang dapat dimanfaatkan secara internal maupun eksternal termasuk pemanfaatan oleh lingkup Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai alat kontrol, evaluasi rencana pembangunan maupun data untuk menyusun perencanaan pembangunan. Hal-hal yang dilakukan kedepan adalah Bakorwil lebih mengoptimalkan pengumpulan dan pengolahan data yang berasal dari kabupaten/kota di wilayah kerjanya yang diperoleh pada saat koordinasi, monitoring, termasuk peninjauan lapangan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pelaksanaan program, perlu memanfaatkan berbagai ***peluang*** yang ada yang berasal dari faktor eksternal Bakorwil Jawa Timur, yaitu:

1. Adanya respon dan kepercayaan yang baik dari Pemda Kab./Kota di Wilayah Bakorwil Jawa Timur;
2. Adanya dukungan dari Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam menunjang program kegiatan Bakorwil Jawa Timur;

3. Adanya kerjasama dengan Perangkat Daerah Provinsi, perguruan tinggi, pakar/praktisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai mitra kerja koordinasi, pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bakorwil sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur maka terdapat beberapa permasalahan pembangunan dalam urusan **"Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian, dan Persandian"** sebagai berikut:

*Tabel 3. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah*

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik	Masih ada ASN yang belum memahami mengenai Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
2	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	Belum terpenuhinya semua sarana dan prasarana yang belum ada.
3	Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang belum sesuai dengan tupoksinya
4	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Sumber Daya Manusia	Masih ada ASN yang kemampuannya belum sesuai dengan perkembangan teknologi.

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Terpilih

Pasca pemilu kepala daerah Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjadi penanggung jawab penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk periode 2019-2024. Pada periode masa jabatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

menetapkan visinya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yaitu ***Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintah yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong***. Oleh karena itu, Bakorwil I Madiun selaku perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ada di daerah dengan tupoksi melaksanakan, mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur, maka seluruh kebijakan, program dan kegiatannya harus dibuat untuk turut mendorong terwujudnya visi dan misi tersebut. Untuk mendorong visi dan misi Gubernur Jawa Timur maka sasaran yang menjadi lingkup pekerjaan Bakorwil I Madiun adalah **meningkatkan hasil koordinasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun**, dengan fokus **Misi ke-3** yaitu **Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan**.

Dengan demikian seluruh potensi sumber daya lingkungan strategis internal Bakorwil I Madiun baik yang berkaitan dengan kekuatan yang dimiliki, didayagunakan secara optimal untuk mendukung percepatan terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran strategis sebagaimana telah dituangkan pada RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tupoksi Bakorwil I Madiun.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L**

Bakorwil I Madiun tidak memiliki acuan terhadap Renstra K/L yang relevan.

### **3.4 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

#### **A. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

##### *A. Potensi bencana*

Potensi bencana memberikan efek dan dampak terkait pertumbuhan dan investasi di wilayah Bakorwil I Madiun, sehingga perlu upaya mitigasi bencana dalam perencanaan tata ruang.

##### *B. Peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.*

Perlu perlindungan terhadap lahan pertanian dalam rangka mempertahankan luasan lahan sawah irigasi dan non irigasi untuk menunjang kebutuhan akan pangan sehingga tidak terjadi alih fungsi pada lahan pertanian.

C. *Kegiatan antara kawasan perkotaan dan perdesaan.*

Perlu keterpaduan dan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah Bakorwil I Madiun melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan dimana pembangunan kawasan perkotaan menjadi distribusi hasil produksi dari wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan menjadi pusat produksi agroindustri/agropolitan dan sektor lainnya

D. *Peran kawasan strategis di Bakorwil I Madiun.*

Pemantapan peran dan fungsi Kawasan Strategis sebagai pusat pertumbuhan wilayah untuk menciptakan pusat pertumbuhan dan pemerataan wilayah di Bakorwil I Madiun diperlukan pengembangan kawasan yang meliputi:

1. **Klaster Agropolitan Wilis** yang terdiri dari Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan, Kabupaten Kediri serta Kabupaten Nganjuk;
2. **Klaster Regional Kelud** berfungsi sebagai pemerataan aktifitas pusat pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur yang ditetapkan pada Kabupaten Jombang, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar;
3. Lintas batas daerah antar Kabupaten/Kota dan antara Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kesepakatan kerjasama antar daerah meliputi beberapa bidang pertanian, perkebunan, kesehatan, pariwisata, pendidikan, ketertiban dan keamanan, dan infrastruktur dan sebagainya. Bentuk-bentuk kerjasama antar wilayah tersebut adalah seperti KARISMAPAWIROGO (Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Magetan – Pacitan – Ngawi - Ponorogo), PAWONSARI (Pacitan – Wonogiri - Wonosari), GOLEK PAWON (Ponorogo - Trenggalek – Pacitan - Wonogiri), NGADIPONO

(Nganjuk – Madiun - Ponorogo).

Permasalahan-permasalahan tata ruang wilayah di Bakorwil I Madiun tersebut perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang tepat agar dalam pengembangan tata ruang wilayah bisa terlaksana sesuai dengan arah, maksud dan tujuan yang telah ditentukan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat kegiatan antar wilayah, saluran irigasi baik sekunder maupun tersier, waduk, dam, embung, pasar rakyat, dan sebagainya dibutuhkan untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan dan pemerataan, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran dan peningkatan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan (perluasan penciptaan kawasan agropolitan, minapolitan dan agroindustri) terutama di sekitar kawasan Selingkar Wilis dan Kelud serta Jalur Lintas Selatan (JLS) yang merupakan jalur strategis.

#### B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Isu Strategis KLHS di wilayah Bakorwil I Madiun diantaranya terkait dengan pengelolaan hutan, lahan dan sumber air, permasalahan pencemaran air, tanah dan udara, permasalahan lingkungan perkotaan, masih adanya lahan kritis baik di dalam dan di luar kawasan hutan, masih adanya gangguan kawasan hutan, belum optimalnya informasi geologi dalam rangka mitigasi bencana geologi, konservasi air tanah, pengembangan dan pemanfaatan potensi air tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih di daerah sulit air, terjadinya kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI), efisiensi penggunaan energi listrik belum optimal, potensi energi terbarukan cukup besar pengembangan energi panas bumi masih mengalami beberapa kendala, lokasi sebagian berada di kawasan hutan, percepatan peningkatan produksi gas bumi untuk pasokan gas di kawasan industri Jawa Timur, terjadi peningkatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan hasil analisis maka isu-isu strategis yang ada di wilayah kerja Bakorwil I Madiun adalah sebagai berikut:

**A. Isu Strategis Bidang Pemerintahan** antara lain:

- a. Wilayah pegunungan yang rawan terhadap bencana alam terutama banjir, longsor, kekeringan, angin puting beliung;
- b. Potensi permasalahan perbatasan wilayah antar kabupaten/kota maupun dengan wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah;
- d. Pelaksanaan Big Data Provinsi Jawa Timur;
- e. Perselisihan ormas Perguruan Pencak Silat pada saat tradisi tahunan hari besar keagamaan (Suran Agung, Halal bi Halal, dsb);
- f. Kerawanan terhadap ketertiban umum, keamanan dan ketentraman masyarakat dan penegakkan Perda;
- g. Penangananan kerjasama antar daerah baik antar kabupaten/kota dalam provinsi maupun luar provinsi.

**B. Isu Strategis Bidang Pembangunan Ekonomi**, antara lain:

- a. Penanganan investasi penanaman modal dalam negeri dan modal asing;
- b. Pengembangan agropolitan yang hanya berbasis pada produk pertanian;
- c. Alih fungsi lahan pertanian maupun hutan;
- d. Optimalnya penanganan permodalan Koperasi dan UMKM;
- e. Pengembangan kawasan ekonomi terpadu daerah perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah;
- f. Pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah;
- g. Kerusakan hutan dan pendapatan masyarakat sekitar hutan;
- h. Optimalisasi akses pasar produk industri kecil menengah;
- i. Kondisi infrastruktur pertanian (jaringan irigasi tingkat usaha tani, jalan usaha tani);
- j. Pengawasan lalu lintas peredaran produk pangan dan non pangan.

**C. Isu-isu Strategis Bidang Kemasyarakatan**, antara lain:

- a. Penurunan angka kemiskinan dan jumlah masyarakat miskin;
- b. Akses dan mutu layanan kesehatan terutama angka kematian ibu dan anak, penanganan gizi buruk;

- c. Belum adanya Keadilan dan kesetaraan gender, perlindungan dan kesejahteraan perempuan;
  - d. **Tingkat pengangguran terbuka** terhadap jumlah lapangan pekerjaan;
  - e. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terutama Anjal (anak jalanan), gelandangan, pekerja seks komersial (PSK), pengemis dan gelandangan psikotik;
  - f. Penanganan kualitas pendidikan terutama siswa putus sekolah (wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun) dan penduduk buta aksara, serta perlunya penyeteraanan Pendidikan Madrasah Diniyah;
  - g. Optimalisasi program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN);
  - h. Efektivitas program Raskin untuk Rumah Tangga Sasaran Miskin (RTSM) terutama tepat sasaran, tepat kuantitas, tepat administrasi, dan tepat pembayaran.
- D. **Isu Strategis Bidang Sarana dan Prasarana**, antara lain:
- a. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan;
  - b. pengembangan pemanfaatan energi panas bumi;
  - c. perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi, waduk, dam, dan bendungan;
  - d. Penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama pencemaran air dan pengolahan limbah;
  - e. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
  - f. Keserasian perencanaan dan implementasi RTRW antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - k. Penanganan lahan kritis.

Isu-isu strategis di atas merupakan gambaran dari hasil monitoring, evaluasi, dan koordinasi terhadap kabupaten/kota di wilayah kerja Bakorwil I Madiun dan menjadi prioritas Bakorwil I Madiun di tahun 2019-2024 yaitu:

**“Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun.”**

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bakorwil I Madiun**

##### **A. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi, adapun tujuan yang dimaksud yaitu:

**Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil I Madiun.**

##### **B. Sasaran**

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Adapun sasaran yang dimaksud adalah:

- 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil I Madiun;**
- 2. Meningkatnya Hasil Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil I Madiun.**

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bakorwil I Madiun beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

*Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bakorwil I Madiun*

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil I Madiun	-	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	70%	75%	80%	85%
		1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil I Madiun	Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun	80.10	80.10	80.10	80.15	80.20
		2. Meningkatnya Hasil Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	70%	75%	80%	85%

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi dan Kebijakan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bakorwil I Madiun selama ini masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain tidak dimilikinya aksesibilitas hirarki secara langsung dengan pemerintah kabupaten/kota serta terbatasnya sumber daya manusia (SDM) secara kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karena itu dalam rangka upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan Bakorwil I Madiun dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Adapun strategi dan kebijakan Bakorwil I Madiun adalah seperti pada tabel berikut:

*Tabel 5. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan*

<b>VISI :</b>	Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong		
<b>MISI ke-3:</b>	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil I Madiun	-	1. Meningkatkan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	1. Peningkatan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil I Madiun	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bakorwil I Madiun	1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Bakorwil I Madiun
	2. Meningkatnya Hasil Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil I Madiun	2. Meningkatkan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	2. Peningkatan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mewujudkan kebijakan dan strategi yang ditetapkan, maka untuk mencapainya harus ada langkah yang dilakukan yaitu melalui Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif pada setiap program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Bakorwil I Madiun.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan juga merupakan aspek operasional dari suatu Rencana Strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan tujuan Perangkat Daerah.

Sedangkan yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, *output*, *outcome* maupun dampak sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan sebagaimana yang terdapat dalam lampiran Renstra.

Bakorwil I Madiun telah, sedang, dan akan melaksanakan program-program sebagai berikut:

#### **6.1 Rencana Program**

##### **A. Program Tahun 2019:**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
- 4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
- 5) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Pemerintahan
- 6) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Pembangunan Ekonomi
- 7) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Kemasyarakatan
- 8) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Sarana dan Prasarana
- 9) Program Pengembangan Data Informasi

## **B. Program Tahun 2020;**

- 1) Program Pelayanan Kesekretariatan
- 2) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan East Java Super Corridor (EJSC)
- 3) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Pemerintahan
- 4) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Pembangunan Ekonomi
- 5) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Kemasyarakatan
- 6) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Sarana dan Prasarana
- 7) Program Pengembangan Data Informasi

## **C. Program Tahun 2021;**

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kewilayahan

## **D. Rencana Program Tahun 2022 – 2024**

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Pelayanan Penghubung

## **6.2 Kegiatan**

### **A. Kegiatan Tahun 2019**

- 1) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
- 2) Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
- 4) Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah
- 5) Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
- 6) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan anggaran
- 7) Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
- 8) Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
- 9) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan
- 10) Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan
- 11) Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Pendukcapil dan Tugas Pembantuan
- 12) Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan
- 13) Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Pembantuan
- 14) Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan

- 15) Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan
- 16) Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan
- 17) Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan
- 18) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Data Administrasi Wilayah
- 19) Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan
- 20) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Data Administrasi Wilayah
- 21) Kegiatan Sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi

## **B. Kegiatan Tahun 2020**

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
- 2) Pengelolaan Administrasi Keuangan
- 3) Ketatausahaan dan Kepegawaian
- 4) Millennial Job Center (MJC)
- 5) Service Point
- 6) Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan
- 7) Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Pendukcapil dan Tugas Pembantuan
- 8) Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan
- 9) Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Pembantuan
- 10) Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan
- 11) Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan
- 12) Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan
- 13) Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan
- 14) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Data Administrasi Wilayah

## **C. Kegiatan Tahun 2021**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Penyelenggaraan Pemerintahan Kewilayahan
- 8) Penyelenggaraan Pembangunan Kewilayahan

#### D. Rencana Kegiatan Tahun 2022-2024

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Uraian target indikator kinerja program dan kegiatan serta besaran pagu pendanaan indikatif tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Program dan Kegiatan Tahun 2019

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	2019		Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab	Lokasi					
						CAPAIAN	Rp							
1	2	4	5	6	7	8	9	20	21					
Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Madiun	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil I Madiun	3	1	4	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	persen	100%	508.406.552	Bakorwil Madiun	Madiun	
							0	Pelaksanaan 1 Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	persen	100%	508.406.552		
		3	1	4	0	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	persen	100%	4.195.435.967	Bakorwil Madiun	Madiun	
							0	Penyediaan Peralatan Sarana dan Prasarana	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	paket	3	3.195.231.351		
							0	Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana	Jumlah paket Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	paket	5	1.000.204.616		
		3	1	4	0	7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	persen	100%	1.507.916.412	Bakorwil Madiun	Madiun	
							0	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah konsultasi	dokumen	15	755.137.617		
							0	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal - Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	orang	64	752.778.795		
							0	Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	persen	100%	151.838.398	Bakorwil Madiun	Madiun
		0	0	1	1	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dok.	4	48.980.419			
							0	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	Dok.	9	50.659.272		

						0 0 3	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah update database perangkat daerah	paket	4	14.918.300			
						0 4	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	Dok.	1	37.280.407			
Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun	3	1	4	2	1		<b>Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Pemerintahan</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti</b>	persen	105.26%	599.705.737	Bakorwil Madiun	Madiun	
	3	1	4	2	1	0 3	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub Bidang Pemerintahan I	Dok.	3	331.251.905			
	3	1	4	2	1	0 4	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Pendukcapil dan Tugas Pembantuan	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub Bidang Pemerintahan II	Dok.	3	268.453.832			
	3	1	4	2	2		<b>Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Pembangunan Ekonomi</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil koordinasi - Bidang Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti</b>	Persen	105.26%	629.443.449	Bakorwil Madiun	Madiun	
	3	1	4	2	2	0 6	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub Bidang Pembangunan Ekonomi I	Dok.	2	364.298.310			
	3	1	4	2	2	0 7	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Pembantuan	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub Bidang Pembangunan Ekonomi II		2	2	265.145.139		
	3	1	4	2	3		<b>Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Kemasyarakatan</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil koordinasi - Bidang Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti</b>	95%	105.26 %	629.416.090	Bakorwil Madiun	Madiun	
	3	1	4	2	3	0 6	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub Bidang Kemasyarakatan I		3	3	384.714.657		
	3	1	4	2	3	0 7	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub Bidang Kemasyarakatan II		3	3	244.701.433		
	3	1	4	2	4		<b>Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Sarana dan Prasarana</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil koordinasi - Bidang Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti</b>	95%	105.26%	595.792.363	Bakorwil Madiun	Madiun	
	3	1	4	2	4	0 5	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub Bidang Sarana dan Prasarana I		4	4	252.291.424		
	3	1	4	2	4	0 6	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub Bidang Sarana dan Prasarana II		4	4	343.500.939		
	3	1	4	9	7		<b>Program Pengembangan Data Informasi</b>	<b>Persentase Keterisian data dan informasi pembangunan daerah kabupaten/kota</b>	65%	65%	255.785.233	Bakorwil Madiun	Madiun	
						00 1	Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Data	Jumlah koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi data		4	4	145.868.144		

					Administrasi Wilayah	administrasi wilayah						
				002	Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	Jumlah update database SKPD	3	3	47.879.719			
				009	Kegiatan Sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi	Jumlah Dokumen PPID	3	3	62.037.370			
<b>Jumlah Total</b>												

Tabel 7. Program dan Kegiatan Tahun 2020

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	2020		Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab	Lokasi			
						CAPAIAN	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	20	21			
Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Madiun	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil I Madiun	31401	Program Pelayanan Kesekretariatan	1. Persentase Indikator Program	persen	100%	2,520,619,842	Bakorwil Madiun	Madiun			
				2. Persentase Realisasi Anggaran	persen	96%						
				3. Indeks Profesionalisme ASN	-	75						
				0001000100	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	dok.			5	49.872.000	
	0001000100	010001000100	1. Jumlah Dokumen Pelaporan yang Tersusun	Dok.	1							
	0001000100	020001000100	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Dok	1	18.310.000					
	0001000100	030001000100	Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dok.-	6	2.452.437.842					
	Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun	31415	010001000100	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan East Java Super Corridor (EJSC)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan EJSC	persen	70	27.075.000	Bakorwil Madiun	Madiun		
					010001000100	010001000100	Jumlah Generasi Milenial yang difasilitasi	orang	-	-		
					010001000100	010001000100	Service Point	Jumlah Masyarakat yang terlayani	orang	50	27.075.000	
010001000100					010001000100	Sinkronisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Dok.	-	-		
010001000100					010001000100	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Pemerintahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	persen	100%	263,750,000	Bakorwil Madiun	Madiun
010001000100					010001000100	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub Bidang Pemerintahan I	Dok.	2	101.500.000		
31421	010001000100	010001000100	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Pendukcapil dan Tugas Pembantuan	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub Bidang Pemerintahan II	Dok.	2	162.250.000					
				010001000100	010001000100	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Pembangunan Ekonomi	Persentase rekomendasi hasil koordinasi - Bidang Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti	persen	100%	269,412,866	Bakorwil Madiun	Madiun

3	1	4	2	0	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub Bidang Pembangunan Ekonomi I	Dok.	2	140.936.766		
3	1	4	2	0	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Pembantuan	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub Bidang Pembangunan Ekonomi II	Dok.	2	128.476.100		
3	1	4	2	3	<b>Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Kemasyarakatan</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil koordinasi - Bidang Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti</b>	persen	100%	159,148,031	Bakorwil Madiun	Madiun
3	1	4	2	0	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub Bidang Kemasyarakatan I	Dok.	2	114.010.318		
3	1	4	2	0	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub Bidang Kemasyarakatan II	Dok.	2	45.137.713		
3	1	4	2	4	<b>Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Sarana dan Prasarana</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil koordinasi - Bidang Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti</b>	persen	100%	187,455,878	Bakorwil Madiun	Madiun
3	1	4	2	0	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub Bidang Sarana dan Prasarana I	Dok.	2	88.299.500	Bakorwil Madiun	Madiun
3	1	4	2	0	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub Bidang Sarana dan Prasarana II	Dok.	2	99.156.378	Bakorwil Madiun	Madiun
3	1	4	9	7	<b>Program Pengembangan Data Informasi</b>	<b>Persentase Keterisian data dan informasi pembangunan daerah kabupaten/kota</b>	persen	60%	21.233.500	Bakorwil Madiun	Madiun
3	1	4	9	7	Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Data Administrasi Wilayah	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Data Administrasi Wilayah	2	2	21.233.500	Bakorwil Madiun	Madiun

Tabel 8. Program dan Kegiatan Tahun 2021-2022

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (PERENCANAAN KONDISI AWAL TAHUN 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab	Lokasi			
										2021		2022						
										Target	Rp	target	Rp					
1	2	3				4	5	6	6	10	11	12	13	20	21			
Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Madiun	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil I Madiun	X	X	X	0	1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1. Persentase Indikator Program yang tercapai	-	-	100%	16.057.856.500	100%	16.261.750.000	Bakorwil Madiun	Madiun		
								2. Persentase Realisasi Anggaran	-	-	96%		96%					
								3. Indeks Profesionalitas ASN	-	-			82.00					
		X	X	X	0	1	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	dokumen	-	1	54.191.000	1	60.000.000	Bakorwil Madiun	Madiun	
							01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah	dokumen	-	11	7.671.000	7	6.433.565			
							02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA	Jumlah dokumen RKA	Dokumen	-	1	9.804.000	1	3.540.000			
							03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Dokumen	-	1	4.844.000	1	2.310.000			
							04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA	Jumlah dokumen DPA	Dokumen	-	1	6.471.000	1	2.615.000			
							05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA	Jumlah dokumen Perubahan DPA	Dokumen	-	1	5.737.000	1	2.500.000			
							06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah dokumen Capaian Kinerja	Dokumen	-	1	7.332.000	1	3.000.000			
							07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Kinerja	Dokumen	-	1	12.332.000	1	1.670.500			
		X	X	X	0	1	0	2	<b>Administrasi Keuangan</b>	Jumlah laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	laporan	-	1	13.806.002.500	1	13.844.250.000	Bakorwil Madiun	Madiun
							01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Laporan	-	12	13.467.330.000	12	12.523.896.000			
							02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	-	12	300.600.000	12	287.780.000			
							03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Laporan	-	12	7.741.000	12	6.261.800			
							04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi	Laporan	-	12	5.398.000	12	5.650.200			
							05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Keuangan SKPD	Dokumen	-	2	7.403.500	2	3.002.703			
							06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Atas LHP	Dokumen	-	1	5.011.000	1	3.195.100			
							07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	-	12	6.334.000	12	4.333.000			
							08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	Laporan	-	1	6.185.000	1	2.051.500			
		X	X	X	0	1	0	5	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan	-	1	105.593.000	1	111.000.000	Bakorwil Madiun	Madiun
					01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah laporan presensi pegawai	Laporan	-	12	85.791.000	12	38.740.000					
					02	-	-											
					03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Laporan	-	12	4.153.000	12	3.834.242					
					04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	Laporan	-	12	3.508.000	12	3.275.400					
					05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP	Laporan	-	12	12.141.000	12	7.643.500					
X	X	X	0	1	0	6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Laporan	-	1	621.196.000	1	713.000.000	Bakorwil Madiun	Madiun		
					01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah paket pengadaan	paket	-	1	18.750.000	1	19.597.492					

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (PERENCANAAN KONDISI AWAL TAHUN 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab	Lokasi						
							2021		2022									
							Target	Rp	target	Rp								
1	2	3	4	5	6	6	10	11	12	13	20	21						
				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
				02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	-	1	17.410.000	1	78.857.964							
				03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	paket	-	1	7.200.000	1	55.184.540							
				04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	-	12	3.500.000	12	1.353.635							
				05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	paket	--	12	32.618.000	12	12.959.219							
				06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket pengadaan	paket	-	-	-	-	-							
				07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket pengadaan	paket	-	2	2.500.000	2	13.838.638							
				08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	paket	-	12	23.600.000	12	20.430.000							
				09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	-	12	515.618.000	12	947.202.542							
				10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	Dokumen	-	-	-	-	-							
				11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	-	-	-	-	-							
		X	X	X	0	1	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Laporan	-	1	1.061.024.000	1	1.091.500,000		
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	Paket	-	12	6.250.000	12	5.650.000						
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dokumen	-	12	403.704.000	12	389.775.492						
				03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	-	-	-	-	-						
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Paket	-	3	651.070.000	3	664.936.023						
		X	X	X	0	1	0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Laporan	-	1	409.850.000	1	442.000,000		
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket	-	12	38.800.000	12	37.895.720						
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	Paket	-	12	70.400.000	12	70.157.825						
				03	-	-	-	-	-	-	-							
				04	-	-	-	-	-	-	-							
				05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Paket	-	1	2.000.000	-	-						
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Paket	-	12	48.750.000	12	28.525.000						
				07	-	-	-	-	-	-	-							
				08	-	-	-	-	-	-	-							
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket	-	2	249.900.000	2	174.498.400						
Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun	4	0	1	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	Jumlah rekomendasi pemerintahan dan pembangunan kewilayahan yang ditindaklanjuti	Rekomen dasi	-	32	1.727.556.500	-	-					
				1	0	1	1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kewilayahan	Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kewilayahan yang tersusun	Rekomen dasi	-	14	431.436.000	-	-			
				0	1	0	1	Pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya	Jumlah Sinkronisasi Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kewilayahan Lingkup Sub Bidang: 1) Pemerintahan I; 2) Pemerintahan II; Pembangunan Ekonomi	Dokumen	-	-	-	-	-			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (PERENCANAAN KONDISI AWAL TAHUN 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab	Lokasi	
							2021		2022				
							Target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	6	10	11	12	13	20	21	
			020	Fasilitasi, Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya	I; 4) Pembangunan Ekonomi II; 5) Kemasyarakatan I; 6) Kemasyarakatan II; 7) Sarpras I; 8) Sarpras II	Dokumen	-	4	103.685.000	-	-		
			030	Inventarisasi, pengolahan dan analisis permasalahan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya		Dokumen	-	-	-	-	-		
			040	Fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya		Dokumen	-	3	61.996.000	-	-		
			050	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya		Dokumen	-	7	265.755.000	-	-		
			1020	<b>Penyelenggaraan Pembangunan Kewilayahan</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pembangunan Kewilayahan yang tersusun</b>	<b>Rekomendasi</b>	-	<b>31</b>	<b>1.296.120.500</b>	-	-		
			010	Koordinasi pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah sesuai potensi Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya	Jumlah Sinkronisasi Perencanaan Penyelenggaraan Pembangunan Kewilayahan Lingkup Sub Bidang: 1) Pemerintahan I; 2) Pemerintahan II; Pembangunan Ekonomi I; 4) Pembangunan Ekonomi II; 5) Kemasyarakatan I; 6) Kemasyarakatan II; 7) Sarpras I; 8) Sarpras II		-	3	67.974.000	-	-		
			020	Fasilitasi, Koordinasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya			-	8	496.600.500	-	-		
			030	Koordinasi pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya			-	4	141.665.000	-	-		
			040	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya			-	16	589.881.000	-	-		
				<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>	<b>Persentase rekomendasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kewilayahan yang ditindaklanjuti</b>			-	-	75%	561.920.000		
			010	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah rekomendasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kewilayahan yang ditindaklanjuti			-	-		561.920.000		
			010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			-	-		561.920.000		

Tabel 9. Tahun 2023-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (PERENCANAAN KONDISI AWAL TAHUN 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab	Lokasi		
										2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH					
										target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3				4	5	6	6	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Madiun	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil Madiun	X	X	X	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100%	17.406.900.000	100%	19.219.529.744	100%	66,945,260,000	Bakorwil Madiun	Madiun		
										96%		96%		96%					
		X	X	X	0	1	0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	dokumen	-	1	8.053.710	1	27.818.565	4	258,191,000	Bakorwil Madiun	Madiun	
							01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah	dokumen	-	11	2.952.400	11	2.952.400	44	37,671,000		
							02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA	Jumlah dokumen RKA	Dokumen	-	1	767.200	1	767.200	4	45,804,000		
							03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Dokumen	-	1	642.200	1	642.200	4	22,844,000		
							04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA	Jumlah dokumen DPA	Dokumen	-	1	767.200	1	9.000.000	4	30,471,000		
							05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA	Jumlah dokumen Perubahan DPA	Dokumen	-	1	652.200	1	8.000.000	4	26,737,000		
							06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah dokumen Capaian kinerja	Dokumen	-	1	1.630.310	1	10.000.000	4	34,332,000		
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Kinerja	Dokumen	-	1	642.200	1	18.000.000	4	60,332,000				
		X	X	X	0	1	0 Administrasi Keuangan	Jumlah laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	laporan	-	1	13.360.171.390	1	14,859,653,500	4	56,862,406,000	Bakorwil Madiun	Madiun	
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Laporan	-	12	13.074.900.000	12	14,500,000,000	48	55,467,330,000				
					02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	-	12	277.212.000	12	315.000.000	48	1,230,600,000				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (PERENCANAAN KONDISI AWAL TAHUN 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab	Lokasi						
							2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH									
							target	Rp	target	Rp	target	Rp								
1	2	3	4	5	6	6	14	15	16	17	18	19	20	21						
				03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Lapaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Laporan	-	12	2.736.000	12	10.000.000	48	34,741,000							
				04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akutansi	Laporan	-	12	865.900	12	6.500.000	48	23,398,000							
				05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Keuangan SKPD	Dokumen	-	2	853.700	2	7.403.500	8	30,307,000							
				06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Atas LHP	Dokumen	-	1	665.700	1	5.750.000	4	21,511,000							
				07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	-	12	2.295.890	12	7.500.000	48	27,334,000							
				08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	Laporan	-	1	642.200	1	7.500.000	4	27,185,000							
		X	X	X	0	1	0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan	-	1	534.737.720	1	125,500,000	4	460,093,000	Bakorwil Madiun	Madiun
				01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah laporan presensi pegawai	Laporan	-	12	528.830.000	12	100.000.000	48	370,791,000							
				02 -	-		-													
				03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Laporan	-	12	4.817.620	12	6.000.000	48	14,153,000							
				04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	Laporan	-	12	517.200	12	12.000.000	48	24,008,000							
				05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP	Laporan	-	12	572.900	12	13.500.000	48	51,141,000							
		X	X	X	0	1	0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Laporan	-	1	1.377.268.550	1	942,000,000	4	3,103,696,000	Bakorwil Madiun	Madiun
				01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	-	1	20.000.100	1	20.000.000	4	77,250,000							
				02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	-	1	34.726.200	1	18.500.000	4	71,410,000							
				03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	paket	-	1	19.841.500	1	8.500.000	4	31,200,000							
				04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	-	12	-	12	5.000.000	48	17,000,000							
				05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	paket	--	12	15.164.000	12	45.000.000	48	152,618,000							
				06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket pengadaan	paket	-													

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (PERENCANAAN KONDISI AWAL TAHUN 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab	Lokasi						
							2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH									
							target	Rp	target	Rp	target	Rp								
1	2	3	4	5	6	6	14	15	16	17	18	19	20	21						
				07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket pengadaan	paket	-	2	10.044.000	2	10.000.000	8	25,000,000						
				08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	paket	-	12	50.000.000	12	35.000.000	48	113,600,000						
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	-	12	1.227.492,750	12	800.000.000	48	2,615,618,000						
				10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	Dokumen	-	-	-										
				11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	-	-	-										
		X	X	X	0	1	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Laporan	-	1	1.148.318,630	1	1,137,500,000	4	4,397,024,000		
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	Paket	-	12	7.000.000	12	7.500.000	48	27,250,000						
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dokumen	-	12	453.460.000	12	440.000.000	48	1,673,704,000						
				03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	-												
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Paket	-	3	687.858.630	3	690.000.000	12	2,696,070,000						
		X	X	X	0	1	0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Laporan	-	1	278.350.000	1	536,000,000	4	1,863,850,000		
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket	-	12	51.306.000	12	40.000.000	48	158,800,000						
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	Paket	-	12	80.819.000	12	76.000.000	48	292,400,000						
				03	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				04	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Paket	-	1	5.000.000	1	10.000.000	4	24,000,000						

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (PERENCANAAN KONDISI AWAL TAHUN 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab	Lokasi
							2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	6	14	15	16	17	18	19	20	21
				06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Paket	-	12 29.225.000	12 60.000.000	48	213,750,000			
				07 -	-	-	-	-	-	-	-			
				08 -	-	-	-	-	-	-	-			
				09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket	-	2 112.000.000	2 350.000.000	8	1,174,900,000			
	Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun			<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>	<b>Persentase rekomendasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kewilayahan yang ditindaklanjuti</b>	<b>persen</b>		80% 700.000.000	85% 2.000.000.000					
				01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah rekomendasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kewilayahan yang ditindaklanjuti	rekomendasi		16 700.000.00	16 2.000.000.00					
				01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	laporan		700.000.000	2.000.000.000					

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Bakorwil I Madiun mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

*Tabel 9. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD*

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)
1.	Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun	A	A	A	A	A	A	A
2.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kewilayahan yang ditindaklanjuti	96%	100%	70%	75%	80%	85%	100%

*Tabel 10. Nawa Bhakti Satya – Bakorwil I Madiun*

NAWA BHAKTI SATYA	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR PD	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			
					2021	2022	2023	2024
Bhakti – 2: Jatim Kerja “Memperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi”	<b>EAST JAVA SUPER CORRIDOR (EJSC):</b> 1. Milenial Job Center (MJC); 2. Service Point dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	250.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000

Indikator Kinerja Bakorwil I Madiun:

Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, dengan Indikator Kinerja yaitu:

1. Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun;
2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kewilayahan yang ditindaklanjuti.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dokumen Renstra Perubahan Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024 merupakan serangkaian rencana program dan kegiatan mendasar yang berorientasi pada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dengan hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan dan telah memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan/ kendala yang dihadapi organisasi.

Dokumen Renstra Perubahan ini juga merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bakorwil I Madiun serta sebagai pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra.

Akhirnya sebagai kelanjutan penjabaran Renstra Perubahan Bakorwil I Madiun akan disusun rencana kegiatan/aksi (*action plan*) tahunan pada tahun-tahun berikutnya, dengan harapan bersama semoga dalam pelaksanaan tugas dapat memperoleh hasil yang optimal.

Madiun, 14 April 2023  
KEPALA BAKORWIL I MADIUN



**R. HERU WANGONO SANTOSO, S.Sos., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670221 198809 1 001

